

KONSTRUKSI CITRA POLRI RAMAH ANAK: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

Nona Pricillia Ohei^{1,a}, Tria Patrianti², Hardy R. Hermawan³, Jan Prince Permata⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

^{3,4}Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

nonaohei1976@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membedah strategi pembedahan media online terhadap citra Polri ramah anak sepanjang tahun 2025. Menggunakan model analisis framing Pan dan Kosicki, penelitian kualitatif ini membedah 50 unit berita dari lima media dengan latar belakang ideologi yang berbeda: Kompas.com, Tempo.co, Antaranews.com, Republika.co.id, dan BBC News Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya fragmentasi narasi yang signifikan pada level mikro, meso, dan makro. Media pemerintah cenderung mengonstruksi frame institusional-prosedural yang menekankan pada keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, media independen dan asing lebih menonjolkan frame kritis-humanis yang berfokus pada akuntabilitas dan standar hak asasi manusia. Republika menyajikan dimensi unik melalui frame moral-religius yang mengaitkan kepolisian dengan ketahanan keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa reputasi Polri di ruang digital bukan merupakan entitas tunggal, melainkan hasil negosiasi wacana yang dipengaruhi oleh kebijakan redaksional media. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara komunikasi humas institusional dengan realitas kultural di lapangan guna meminimalisir gap persepsi publik.

Kata Kunci: Analisis Framing, Model Pan dan Kosicki, Polri Ramah Anak, Manajemen Reputasi, Media Online.

PENDAHULUAN

Transformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini menempatkan penguatan citra ramah anak sebagai salah satu prioritas utamanya. Sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum, anak membutuhkan perlakuan khusus yang sensitif terhadap kondisi psikologisnya. Konsep polisi ramah anak berkaitan erat dengan komunikasi humanis dan reformasi kultural untuk mengikis kesan otoriter. Hidayat (2025) menegaskan bahwa reformasi kultural merupakan jantung dari transformasi kepolisian demi menegakkan legitimasi institusi.

Dalam perspektif teoritis, Littlejohn et.al (2017) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pembangunan identitas institusional. Oleh karena itu, identitas Polri ramah anak bukan sekadar kebijakan internal, melainkan harus dikomunikasikan secara konsisten kepada publik (Putri, 2025). Strategi hubungan masyarakat serta pendekatan inklusif terhadap kelompok rentan memainkan peranan kunci dalam reposisi citra tersebut (Smith, 2024; White & Lewis, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, perlindungan anak merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Implementasi kebijakan ini menuntut pendekatan yang amat spesifik. Thompson (2025) menyoroti krusialnya teknik wawancara yang sensitif terhadap trauma agar tidak menimbulkan rasa takut pada anak. Kehadiran fasilitas fisik seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) turut berfungsi sebagai bentuk komunikasi non-verbal yang efektif untuk mengurangi kecemasan (Nugraha, 2025).

Penerapan keadilan restoratif yang mengedepankan dialog daripada sanksi punitif menjadi inti pelayanan ramah anak (Prasetyo, 2025). Interaksi awal yang positif dan berempati antara kepolisian dan komunitas muda ini amat vital untuk membangun kepercayaan serta stabilitas sosial masa depan (Verma & Kumar, 2025; Walker, 2025).

Meski demikian, keberhasilan dan keberlanjutan citra institusional Polri tidak dapat dilepaskan dari peran media massa. Pan dan Kosicki (1991) menjelaskan bahwa media berperan besar dalam mengonstruksi realitas sosial melalui proses seleksi dan pembingkaihan (framing) informasi. Media tidak sekadar melaporkan fakta secara netral, tetapi memilih sudut pandang tertentu yang menentukan bagaimana publik memahami suatu institusi (Eriyanto, 2012; McQuail & Deuze, 2020).

Entman (1993) menyoroti bahwa framing menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk mendefinisikan masalah dan memberikan penilaian moral. Dalam konteks pemeliharaan reputasi, framing media online dapat bertindak sebagai alat kontrol sosial sekaligus penyokong kebijakan Polri (Zelizer, 2025).

Karakteristik media online di Indonesia sangat beragam dan dinamis. Media seperti Kompas dan Tempo cenderung kritis dalam melihat kinerja kepolisian, Antara cenderung menyuarakan agenda pemerintah, Republika menyoroti dimensi moral masyarakat, sementara BBC Indonesia membawa standar internasional (Amalia & Pratama, 2025). Keberagaman ideologi redaksional ini memicu kesenjangan antara pesan humas yang disampaikan Polri dengan narasi yang diterima publik (Santoso, 2025). Setyawan (2025) melihat adanya ketegangan antara etika jurnalisme dan eksploitasi identitas anak demi mengejar komersialisasi trafik berita.

Meskipun Dewan Pers (2025) terus memperbarui pedoman pemberitaan ramah anak, KPAI (2025) masih mencatat maraknya pelanggaran privasi dan stigmatisasi anak di ruang digital. Mengingat isu kekerasan anak sangat emosional, efek pembingkaihan media dapat berdampak sangat kuat terhadap kredibilitas kepolisian (Scheufele, 1999).

Untuk membedah kompleksitas pembingkaihan tersebut, penelitian ini mengadopsi kerangka analisis framing model Pan dan Kosicki (1991). Model ini membedah struktur berita ke dalam empat dimensi operasional sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Dimensi Analisis Framing Pan dan Kosicki pada Isu Polri

Struktur Analisis	Perangkat Framing	Fokus Observasi
Sintaksis	Headline, Lead, Kutipan	Penempatan diksi humanis vs prosedural dalam judul berita.
Skrip	Kelengkapan 5W+1H	Alur penceritaan polisi sebagai pelindung atau sebagai aktor represif.
Tematik	Hubungan antar Paragraf	Argumentasi media mengenai konsistensi Polri dalam perlindungan anak.
Retoris	Diksi, Foto, Metafora	Penggunaan elemen visual dan kata ganti yang membangun kesan ramah.

Sumber: Pan dan Kosicki (1991)

Analisis struktural ini digunakan untuk membedah praktik bahasa sebagai bentuk kekuasaan dan ideologi (Fairclough, 2010; Littlejohn et al., 2017). Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak

pada adanya inkonsistensi pembingkai citra Polri ramah anak di berbagai media online akibat perbedaan latar belakang ideologis media.

Penelitian ini kemudian merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama, yaitu mengenai bagaimana struktur sintaksis dan skrip dimanfaatkan oleh media online dalam memberitakan isu Polri ramah anak, bagaimana perangkat tematik dan retorik menonjolkan narasi citra kepolisian tersebut, serta bagaimana perbedaan kecenderungan pembingkai antara media berlatar belakang pemerintah, swasta nasional, dan media asing.

Selain itu, penelitian juga diarahkan untuk memetakan secara komprehensif konstruksi realitas Polri ramah anak pada media online sepanjang tahun 2025. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan analisis framing dalam studi komunikasi publik. Secara praktis, temuan berbasis data empiris ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategis bagi Divisi Humas Polri dalam mengelola reputasi dan menyelaraskan komunikasi institusional di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma konstruksionisme yang memandang realitas sosial dikonstruksi melalui proses komunikasi dan penggunaan bahasa dalam media massa. Metode yang dipilih adalah analisis framing model Pan dan Kosicki untuk membedah struktur kognitif di balik teks berita mengenai Polri ramah anak. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sangat efektif untuk mengeksplorasi makna yang kompleks dari suatu fenomena sosial. Analisis framing memungkinkan peneliti melihat bagaimana fakta dipilih dan ditonjolkan, sekaligus membantu mengungkap ideologi tersembunyi jurnalis dalam membingkai sebuah institusi (Eriyanto, 2012).

Sumber data penelitian ini berasal dari pemberitaan pada lima portal berita online nasional, yaitu Kompas.com, Tempo.co, Antaranews.com, Republika.co.id, dan BBC News Indonesia. Pemilihan media secara *purposive sampling* ini mewakili keberagaman karakter dan basis ideologi media di Indonesia. Unit analisis yang diteliti adalah teks berita utuh berperiode 1 Januari 2025 sampai 25 Desember 2025 dengan kata kunci pencarian "Polri Ramah Anak" dan "Polisi Sahabat Anak".

Sebanyak 50 sampel berita dikumpulkan secara seimbang, dengan mengambil masing-masing 10 berita per media. Pan dan Kosicki (1991) menekankan pentingnya analisis pada struktur formal teks untuk menemukan kerangka pemikiran media. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dengan mengarsipkan teks berita beserta elemen pendukung seperti judul, teras berita, badan berita, hingga foto atau ilustrasi visual. McQuail dan Deuze (2020) menyatakan bahwa teks berita online memiliki karakteristik khusus karena sifatnya yang cepat dan interaktif. Data diklasifikasikan berdasarkan kategori media guna menjamin validitasnya.

Tahapan analisis data mengikuti prosedur struktural Pan dan Kosicki melalui dekonstruksi empat dimensi utama. Pertama, analisis struktur sintaksis melihat penyusunan fakta dalam skema berita. Kedua, analisis struktur skrip membedah pengemasan peristiwa melalui unsur 5W+1H. Ketiga, analisis struktur tematik mengidentifikasi pandangan jurnalis melalui hubungan antarparagraf. Keempat, analisis struktur retorik menemukan penekanan makna lewat pilihan diksi dan perangkat visual.

Fairclough (2010) berpendapat bahwa setiap elemen bahasa dalam teks memiliki muatan kekuasaan tertentu. Seluruh temuan tersebut disintesis untuk menemukan frame dominan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Operasionalisasi Dimensi Analisis Framing

Dimensi Analisis	Unit Pengamatan	Indikator Pencapaian
Sintaksis	Judul, Lead, Kutipan	Cara media menempatkan Polri dalam struktur hierarki berita.
Skrip	Kelengkapan Narasi	Kehadiran aspek perlindungan anak dalam alur berita.
Tematik	Koherensi Paragraf	Konsistensi argumen jurnalis mengenai isu ramah anak.

Retoris	Metafora, Diksi, Foto	Penekanan emosional dan visual terhadap citra kepolisian.
---------	-----------------------	---

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Struktur sintaksis menjadi awal observasi elemen formal guna menonjolkan kredibilitas Polri. Struktur skrip membedah penyajian fakta berfokus pada perlindungan anak, sementara dimensi tematik mengeksplorasi koherensi ideologi di balik teks. Dimensi retorik melengkapi analisis melalui pemilihan kata dan simbol visual yang menggugah persepsi afektif. Seluruh indikator ini menjadi satu kesatuan instrumen untuk mengungkap bagaimana citra Polri ramah anak diproduksi dan didistribusikan melalui kanal komunikasi digital.

HASIL DAN DISKUSI

Pemilihan media dalam penelitian ini mencerminkan keberagaman pengaruh dalam struktur sosial-politik Indonesia. Kompas.com menekankan presisi legalitas untuk menentukan agenda publik nasional (Eriyanto, 2012), sedangkan Tempo.co berfokus pada fungsi pengawasan institusional yang kritis (Pan & Kosicki, 1991). Antaranews.com bertugas menjaga stabilitas informasi kenegaraan (McQuail & Deuze, 2020), Republika.co.id membawa perspektif moralitas dan komunitas (Zelizer, 2025), serta BBC News Indonesia menyajikan standar hak asasi manusia internasional sebagai pembanding kinerja lokal (White & Lewis, 2025).

Sepanjang tahun 2025, 50 unit analisis berita menunjukkan pola frekuensi yang dinamis. Antaranews.com mendominasi volume berita melalui kegiatan pengayoman untuk membangun memori kolektif positif (Smith, 2024). Kompas.com melaporkan fakta hukum secara stabil guna memupuk kepercayaan publik (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017). Sebaliknya, Tempo.co dan BBC News Indonesia merespons anomali kasus ekstrem yang bernilai berita tinggi (Pan & Kosicki, 1991), sementara Republika.co.id menyelaraskan narasi dengan kalender keagamaan Polri sebagai bagian dari manajemen komunikasi terencana (Hidayat, 2025).

Narasi Polri ramah anak dipedah ke dalam tiga pilar isu utama: perlindungan anak dari kekerasan, program preventif Polisi Sahabat Anak, dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaporan kasus anak sebagai korban berdampak langsung pada trauma psikologis mereka (Thompson, 2025), sedangkan program preventif mereposisi citra Polri menjadi institusi edukatif (Putri, 2025). Di sisi lain, narasi keadilan restoratif bagi anak pelaku menjadi ujian profesionalisme kepolisian (Prasetyo, 2025) yang membentuk ekosistem informasi kompleks (Nugraha, 2025). Secara keseluruhan, persaingan wacana ini memperlihatkan bagaimana pembingkaihan media pemerintah bertujuan memperkuat dukungan publik terhadap institusi (Scheufele, 1999). Karakteristik objek penelitian tersebut tergambarkan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3 Karakteristik Objek Penelitian

Media Online	Frekuensi Berita	Fokus Isu Dominan	Karakteristik Narasi
Kompas.com	10 Berita	Penegakan Hukum & Prosedur	Legalistik dan Netral
Tempo.co	10 Berita	Evaluasi Kinerja & Hak Anak	Kritis dan Investigatif
Antaranews.com	10 Berita	Bakti Sosial & Seremonial	Afirmatif dan Humanis
Republika.co.id	10 Berita	Moralitas & Ketahanan Keluarga	Edukatif dan Religius
BBC News Indo	10 Berita	Standar HAM & Isu Global	Objektif dan Mendalam

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Fairclough (2010) menyebutkan bahwa terdapat hubungan kekuasaan yang sangat kuat di balik setiap pilihan kata dalam berita. Republika memberikan bingkai moralitas yang menyatukan peran polisi dengan peran orang tua di lingkungan keluarga. Santoso (2025) menilai bahwa keragaman narasi ini menguntungkan publik untuk mendapatkan informasi yang lebih seimbang. Keseluruhan data deskriptif ini menjadi dasar yang kuat untuk masuk ke dalam analisis framing yang lebih mendalam pada bab selanjutnya.

Struktur Analisis Framing

Analisis tingkat mikro ini memfokuskan perhatian pada elemen teknis dari 50 berita yang telah dikurasi secara sistematis. Elemen kebahasaan dan struktur berita digunakan untuk mengonstruksi citra Polri ramah anak. Pan dan Kosicki (1991) menegaskan bahwa rincian kecil dalam teks berita merupakan cerminan dari cara berpikir jurnalis terhadap suatu isu, seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4 Ringkasan Temuan Mikro Analisis

Framing Dimensi Analisis	Indikator Utama	Temuan pada Media Pro-Institusi	Temuan pada Media Kritis/Asing
Sintaksis	Subjek & Narasumber	Polri sebagai Subjek; Sumber Internal	Polri sebagai Objek; Sumber Eksternal
Skrip	Alur & Penutup	Narasi Solutif; Penutup Optimis	Narasi Evaluatif; Penutup Kritis
Tematik	Proposisi & Ideologi	Tema Pengabdian dan Legalitas	Tema Akuntabilitas dan Hak Asasi
Retoris	Diksi & Visual	Foto Interaksi Hangat; Diksi Lembut	Foto Dokumenter; Metafora Tajam

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Tabel menunjukkan, setiap dimensi dalam struktur ini memiliki peran strategis untuk menonjolkan aspek tertentu dari realitas kepolisian. Melalui pembedahan struktur sintaksis hingga retorik, peneliti dapat mengungkap lapisan ideologi yang tersembunyi di balik narasi media online nasional dan asing selama tahun 2025.

1. Analisis Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis menunjukkan bagaimana media menyusun unit fakta terkecil untuk membentuk kesan pertama pembaca. Antaranews dan Republika secara konsisten menempatkan Polri sebagai subjek aktif melalui kata kerja afirmatif seperti "Polri Menjamin" guna memberikan kesan kendali institusional (Pan & Kosicki, 1991) dan memperkuat otoritas lembaga (Eriyanto, 2012). Sebaliknya, Tempo dan BBC News Indonesia sering menempatkan Polri sebagai objek kritik masyarakat, yang mencerminkan fungsi media sebagai pengawas sosial (McQuail & Deuze, 2020). Dalam teras berita (*lead*), Kompas dan Antara bergantung pada otoritas resmi kepolisian sehingga menghasilkan narasi birokratis-prosedural (Littlejohn et al., 2017). Sementara itu, Tempo memberi ruang bagi narasumber independen untuk menciptakan sudut pandang inklusif (Zelizer, 2025) sekaligus memverifikasi klaim keramahan institusi (White & Lewis, 2025). Penempatan fakta ini tidak pernah netral; BBC News Indonesia menaruh kutipan pejabat di akhir berita sebagai konfirmasi masalah yang dapat melemahkan posisi tawar institusi (Smith, 2024). Di sisi lain, Republika menyandingkan tindakan polisi dengan apresiasi tokoh masyarakat, menyajikan citra ramah anak sebagai konsensus sosial yang mendukung reputasi moral Polri (Hidayat, 2025).

2. Analisis Struktur Naskah

Dimensi naskah (skrip) membedah pengemasan berita melalui unsur 5W+1H. Antaranews mengelaborasi elemen "bagaimana" secara emosional untuk membuat realitas lebih meyakinkan (Pan & Kosicki, 1991) sekaligus menutupi kekurangan prosedural (Eriyanto, 2012). Kompas menggunakan skrip kronologis-legalistik yang informatif untuk tujuan edukasi hukum (McQuail & Deuze, 2020). Pada bagian penutup, Republika menyajikan imbauan positif yang mendukung stabilitas sosial (Thompson, 2025), sedangkan Tempo menggunakan pertanyaan terbuka untuk mempertahankan urgensi masalah di ruang publik (Pan & Kosicki, 1991; Zelizer, 2025). Sementara itu, BBC News Indonesia menonjolkan konteks global melalui penjelasan psikologis dan sosiologis agar pembaca paham secara mendalam (Smith, 2024), meski terkadang mencitrakan Polri masih beradaptasi dengan standar internasional (White & Lewis, 2025). Berbeda dengan skrip nasional yang terfokus pada seremonial (Hidayat, 2025), variasi penceritaan ini menentukan apakah Polri dicitrakan sebagai pahlawan atau aktor yang perlu dievaluasi.

3. Analisis Struktur Tematik

Struktur tematik mengidentifikasi benang merah ideologis antarparagraf. Antaranews dan Republika mengusung tema dominan Polri sebagai pelindung bangsa melalui proposisi berulang (Pan & Kosicki, 1991) untuk membangun legitimasi politik (Eriyanto, 2012) lewat pendekatan instruksional *top-down* (Hidayat, 2025). Sebaliknya, Tempo dan BBC News Indonesia mengedepankan pertarungan wacana berbasis akuntabilitas dan HAM (Fairclough, 2010; McQuail & Deuze, 2020), mendesak institusi bekerja melampaui standar minimal (Zelizer, 2025). Di sisi lain, Kompas membangun tema profesionalisme hukum yang mengikat tindakan polisi pada UU Perlindungan Anak No. 35/2014. Pendekatan legalistik yang stabil ini membantu publik memahami batasan wewenang (Littlejohn et al., 2017; Prasetyo, 2025), meskipun berisiko menjauhkan sisi kemanusiaan kepolisian jika terlalu kaku (Santoso, 2025).

4. Analisis Struktur Retoris

Struktur retorik memanfaatkan diksi metaforis dan visual untuk menggugah emosi. Antaranews masif menampilkan foto interaksi fisik hangat polisi dengan anak sebagai penekan makna visual (Pan & Kosicki, 1991) dan simbol komunikasi non-verbal yang menurunkan kecemasan publik (Eriyanto, 2012; Nugraha, 2025). Dalam pilihan kata, Republika menggunakan diksi lembut seperti "Sejuk" dan "Mengayomi" yang mendukung pemulihan trauma anak (Thompson, 2025). Sebaliknya, Tempo menggunakan metafora tajam seperti "Wajah Ganda" untuk menyederhanakan realitas kompleks (Pan & Kosicki, 1991) sekaligus mencerminkan keberpihakan kritis (Zelizer, 2025). Sementara itu, BBC News Indonesia menampilkan keaslian foto jurnalistik tanpa pengaturan gaya demi kredibilitas internasional (Smith, 2024) serta menyertakan data grafis sebagai konteks pemberitaan (White & Lewis, 2025). Dimensi retorik ini menjadi jembatan akhir yang menghubungkan teks dengan emosi pembaca (Hidayat, 2025) guna melekatkan citra ramah anak dalam memori jangka panjang masyarakat.

Analisis terhadap empat dimensi framing Pan dan Kosicki memperlihatkan bahwa konstruksi citra Polri ramah anak diproduksi secara terfragmentasi sesuai orientasi ideologis masing-masing media. Struktur sintaksis dan skrip bekerja pada tataran mekanis melalui pemilihan posisi aktor, penentuan narasumber utama, serta pengemasan alur cerita—baik yang bermuara pada penutupan solutif-optimis maupun evaluatif-kritis. Sementara itu, struktur tematik dan retorik memperdalam wacana tersebut pada tataran makna melalui penegakan isu akuntabilitas versus legitimasi pengabdian, yang disempurnakan oleh pilihan diksi persuasif serta dokumentasi visual di lapangan. Pada akhirnya, keterpaduan keempat dimensi ini membuktikan bahwa citra "polisi ramah anak" di ruang digital bukanlah realitas tunggal yang statis, melainkan hasil kontestasi pembingkai media yang menentukan sejauh mana klaim reformasi kultural kepolisian dapat diterima oleh publik.

Tipologi Framing Media terhadap Polri Ramah Anak

Analisis tipologi framing media berada pada level meso yang bertujuan mengelompokkan temuan-temuan teknis mikro ke dalam kategori tipologi framing yang lebih luas. Peneliti mengidentifikasi

pengelompokan pola pembingkai yang dipengaruhi oleh kedekatan ideologis dan misi redaksional masing-masing media. Pan dan Kosicki (1991) menjelaskan bahwa kluster framing mencerminkan cara organisasi media mengorganisasikan realitas ke dalam kategori yang mudah dipahami publik. Gambaran tipologi framing dan implikasinya terhadap citra Polri tertuang dalam tabel 5.

Tabel 5 Tipologi Framing dan Implikasinya terhadap Citra Polri

Tipologi Frame	Fokus Utama	Target Resepsi Publik	Dominasi Media
Institusional-Prosedural	Ketaatan Hukum & Regulasi	Percaya pada Sistem	Kompas & Antara
Kritis-Humanis	Perlindungan HAM & Evaluasi	Keadilan dan Akuntabilitas	Tempo & BBC News
Moral-Religius	Etika & Ketahanan Keluarga	Keamanan Spiritual/Moral	Republika

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Pengelompokan tipologi ini membantu melihat isu Polri ramah anak dipetakan ke dalam berbagai kepentingan. Melalui tipologi ini, terlihat jelas adanya kontestasi narasi antara penguatan legitimasi institusional dengan tuntutan akuntabilitas publik yang lebih transparan.

1. Frame Institusional-Prosedural (Kompas & Antara)

Frame ini memposisikan Polri sebagai mesin birokrasi dan penegak hukum yang taat regulasi. Kompas dan Antara membingkai kebijakan ramah anak sebagai wujud kepatuhan perundang-undangan demi menciptakan kesan profesionalisme yang tidak terbantahkan (Eriyanto, 2012) serta menstabilkan persepsi publik terhadap efektivitas pemerintah (McQuail & Deuze, 2020). Ketaatan hukum menjadi proposisi utama karena legitimasi dibangun melalui konsistensi antara aturan dan pelaksanaan (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017). Penekanan prosedural ini memberikan rasa aman secara hukum bagi masyarakat (Prasetyo, 2025), meskipun bingkai yang terlalu administratif berisiko mengabaikan dimensi emosional korban anak (Smith, 2024).

2. Frame Kritis-Humanis (Tempo & BBC News)

Kluster ini menilai kepolisian ramah anak melalui lensa HAM dan pengawasan lapangan independen. Tempo dan BBC News Indonesia membandingkan janji institusi dengan realitas praktis (Pan & Kosicki, 1991) guna menjadi cermin jujur yang mengevaluasi celah implementasi kebijakan (Zelizer, 2025). Mengedepankan kepentingan terbaik anak, jurnalisme kritis menggunakan bahasa untuk mendesak perubahan struktural dalam lembaga kekuasaan (Fairclough, 2010). Tekanan media kritis ini justru membantu Polri melakukan reformasi substansial (White & Lewis, 2025) serta menjaga institusi agar tidak terjebak pada pencitraan semu (Hidayat, 2025).

3. Frame Moral-Religius (Republika)

Tipologi ini mengaitkan kinerja Polri dengan nilai agama dan penguatan keluarga, memposisikan polisi sebagai mitra orang tua. Pendekatan moralitas efektif membangun ikatan emosional dengan masyarakat religius (Thompson, 2025) serta mendukung program Polisi Sahabat Anak melalui pendekatan kekeluargaan (Putri, 2025). Integrasi fungsi kepolisian dan nilai agama menciptakan harmoni penegakan hukum (Santoso, 2025) dengan memanfaatkan nilai masyarakat sebagai perangkat retorik yang kuat (Pan & Kosicki, 1991). Kesamaan pandangan terkait etika perlindungan anak ini menumbuhkan kepercayaan publik (Nugraha, 2025), mengubah figur polisi yang ditakuti menjadi dihormati secara moral.

Tipologi Frame yang terbagi ke dalam tiga kategori itu menggambarkan kontestasi wacana serta diferensiasi fungsi redaksional dalam mengonstruksi citra Polri ramah anak. Bingkai Institusional-Prosedural menonjolkan aspek legalitas, regulasi, dan profesionalisme birokrasi; bingkai Kritis-Humanis memberikan penekanan pada evaluasi independen, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas lapangan; bingkai Moral-Religius menyandarkan narasi pada etika, nilai-nilai spiritual, serta ketahanan keluarga. Ketiga tipologi ini membuktikan bahwa persepsi publik terhadap keberhasilan reformasi kultural Polri tidak terbentuk dari satu narasi yang homogen, melainkan dipengaruhi oleh kacamata ideologis media dalam memetakan fungsi kepolisian di tengah masyarakat.

Implikasi Komunikasi Institusional Polri

Analisis Implikasi Komunikasi Institusional Polri berada pada level makro untuk mengevaluasi bagaimana akumulasi dari berbagai tipologi framing media memengaruhi posisi strategis Polri dalam konstelasi manajemen reputasi nasional. Temuan pada level mikro dan meso menunjukkan bahwa citra institusi tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan resultan dari negosiasi narasi yang kompleks. McQuail dan Deuze (2020) berpendapat bahwa media massa memiliki peran sebagai institusi sosial yang menentukan legitimasi organisasi publik.

Tabel 6 Ringkasan Implikasi Strategis bagi Manajemen Komunikasi Polri

Dimensi Implikasi	Tantangan Utama	Rekomendasi
Reputasi Digital	Fragmentasi Persepsi Publik	Integrasi narasi melalui transparansi data lapangan.
	Inkonsistensi Perilaku Aparat	Internalisasi nilai ramah anak melalui pelatihan komunikasi.
Reformasi Kultural	Gap Logika Humas vs Logika Audit	Mengedepankan komunikasi dialogis daripada monolog seremonial.

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Keragaman bingkai ini mencerminkan tantangan besar dalam menyatukan persepsi pemangku kepentingan yang heterogen. Bagian ini mendiskusikan implikasi temuan tersebut terhadap kepercayaan publik dan proses reformasi internal kepolisian.

1. Reputasi Institusi di Ruang Digital

Reputasi di era digital sangat rapuh dan bergantung pada konsistensi narasi media online. Perbedaan *framing* antara media afirmatif dan kritis memicu ambivalensi publik, sebab masyarakat cenderung melakukan triangulasi informasi secara mandiri sebelum menaruh kepercayaan penuh (Smith, 2024). Karena itu, manajemen reputasi yang efektif harus menjawab keraguan dari *frame* kritis melalui aksi nyata (White & Lewis, 2025). Ketidakkonsistenan antara pesan otoritas dan realitas media berisiko memicu krisis kredibilitas (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017). Meskipun *frame* prosedural Kompas dan moral Republika masing-masing memberi kepercayaan teknis dan emosional, *frame* kritis Tempo serta BBC News Indonesia menjadi penguji integritasnya. Keberlangsungan reputasi jangka panjang menuntut kemampuan menyerap kritik media sebagai bahan perbaikan sistemik melalui strategi komunikasi yang lebih dialogis (Walker, 2025).

2. Tantangan Reformasi Kultural Polri dalam Cermin Media

Media berfungsi sebagai cermin penjelas keberhasilan reformasi kultural kepolisian. Jargon "Ramah Anak" kerap dikritik sebagai komoditas kosmetik humas, padahal reformasi sejati menuntut perubahan pola pikir fundamental setiap anggota polisi (Hidayat, 2025). Media secara konsisten menonjolkan anomali antara kebijakan pusat dan perilaku oknum operasional sebagai bentuk koreksi (Pan & Kosicki, 1991). Berfokus pada kemasan komunikasi tanpa perbaikan perilaku nyata hanya akan membawa kegagalan legitimasi (Zelizer, 2025). Kesungguhan

reformasi kultural tercermin dari cara polisi berkomunikasi dengan kelompok rentan (Thompson, 2025), sehingga media kritis bertindak memastikan keramahan mendarah daging sebagai budaya organisasi, bukan sekadar konten media sosial.

3. Sinkronisasi Pesan antara Program Polri dan Persepsi Media

Kesenjangan komunikasi antara program Polri dan resepsi media bersumber dari benturan logika organisasi—antara orientasi visual humas dengan logika audit publik para jurnalis. Jurang narasi ini lahir dari perbedaan kepentingan dalam penggunaan bahasa kekuasaan (Fairclough, 2010). Hambatan ini mengakibatkan pesan positif Polri berisiko dianggap propaganda, terlebih efek *framing* berbekas kuat pada khalayak yang skeptis sejak awal (Scheufele, 1999). Sinkronisasi pesan hanya mungkin terwujud bila institusi menyediakan akses data yang jujur dan terbuka (Santoso, 2025). Oleh sebab itu, Polri harus menempatkan jurnalisme kritis sebagai mitra strategis validasi kebijakan melalui pendekatan komunikasi yang transparan dan berbasis data kinerja terukur.

Komunikasi institusional Polri menegaskan bahwa pengelolaan reputasi digital tidak dapat sekadar mengandalkan narasi humas yang seremonial, melainkan menuntut transparansi, konsistensi perilaku aparat di lapangan, dan penyelarasan logika komunikasi dari monolog menjadi dialogis. Fragmentasi persepsi publik akibat kontrasnya framing media afirmatif dan kritis membuktikan bahwa keberhasilan program "Polisi Sahabat Anak" sangat ditentukan oleh sejauh mana kepolisian menjadikan kritik media sebagai cermin reformasi kultural yang substantif. Pada akhirnya, sinkronisasi pesan dan legitimasi jangka panjang hanya akan terwujud apabila Polri mentransformasi strategi hubungannya dengan media dari sekadar pencitraan menjadi keterbukaan data kinerja berbasis akuntabilitas yang nyata.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pembingkai media terhadap isu Polri ramah anak ini menghasilkan beberapa kesimpulan strategis yang relevan bagi pengembangan ilmu komunikasi dan manajemen reputasi institusi. Analisis pada dimensi mikro mengungkapkan bahwa setiap media memiliki teknik sintaksis dan retorik yang berbeda dalam memposisikan aktor kepolisian. Pan dan Kosicki (1991) menjelaskan bahwa pemilihan narasumber dan penggunaan diksi metaforis merupakan instrumen utama dalam mengarahkan opini pembaca. Peneliti menemukan bahwa citra ramah anak sering kali dicitrakan secara afirmatif oleh media pro-pemerintah melalui visualisasi interaksi hangat antara polisi dan anak. Namun, narasi tersebut mengalami dekonstruksi pada media kritis yang lebih memilih menonjolkan anomali prosedur dan tuntutan akuntabilitas. Eriyanto (2012) menegaskan bahwa perbedaan cara membingkai fakta ini menunjukkan bahwa media tidak pernah netral dalam menyajikan realitas kepolisian.

Pada level meso, tipologi framing yang terbentuk menunjukkan adanya klusterisasi ideologi yang sangat kuat. Kompas dan Antara menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan prosedural melalui narasi ketaatan hukum yang sistematis. Littlejohn, Foss, dan Oetzel (2017) berpendapat bahwa konsistensi pada jalur regulasi sangat penting bagi stabilitas citra institusi negara. Di sisi lain, Tempo dan BBC News Indonesia memberikan keseimbangan melalui pengawasan hak asasi manusia yang memastikan bahwa kebijakan ramah anak tidak berhenti pada tingkat wacana. Republika memberikan kontribusi melalui penguatan nilai-nilai etika yang menjembatani hubungan emosional antara polisi dan masyarakat religius. McQuail dan Deuze (2020) melihat keberagaman tipologi ini sebagai bentuk pluralisme informasi yang dinamis dalam masyarakat demokratis.

Secara makro, implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa manajemen reputasi Polri di ruang digital menghadapi tantangan sinkronisasi pesan yang cukup berat. Kesenjangan antara program yang dirancang oleh humas dengan resepsi media independen mengindikasikan adanya masalah dalam internalisasi nilai reformasi kultural. White dan Lewis (2025) menekankan bahwa reputasi institusi hukum harus dibangun di atas fondasi transparansi dan aksi nyata di lapangan. Hidayat (2025) menyimpulkan bahwa citra ramah anak hanya akan efektif jika Polri mampu menyatukan logika humas dengan logika pelayanan publik yang tulus. Smith (2024) mengingatkan bahwa kepercayaan publik

bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada konsistensi narasi media dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Polri perlu mengadopsi strategi komunikasi yang lebih dialogis dan terbuka terhadap kritik guna menciptakan legitimasi yang substansial di mata masyarakat global dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Pratama, A. (2025). Analisis framing pemberitaan kasus anak berhadapan dengan hukum di media online nasional. *Jurnal Komunikasi (ASPIKOM)*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v9i1.xxx>
- Amnesty International Indonesia. (2025). *Catatan tahunan hak anak dan tindakan aparat penegak hukum*. Amnesty International.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik kriminalitas anak di Indonesia 2025*. BPS RI.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Pers. (2025). *Pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) versi pemutakhiran*. Dewan Pers Indonesia.
- Edelman, M. (1993). Contestable categories and public opinion. *Political Communication*, 10(3), 231-242. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962981>
- Entman, R. N. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Fajri, M. N. (2025). Konstruksi identitas Polri ramah anak di media digital. *Jurnal Komunikasi: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)*, 10(2), 112-125.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Hidayat, D. N. (2025). Reformasi kultural Polri dan strategi komunikasi publik. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 38(1), 22-35.
- ICJR. (2025). *Policy paper: Menuju peradilan anak yang humanis di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- KPAI. (2025). *Laporan pemantauan media: Pelanggaran privasi anak dalam berita kriminal*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Mabes Polri. (2025). *Laporan tahunan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)*. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- McQuail, D., & Deuze, M. (2020). *McQuail's media and mass communication theory* (7th ed.). SAGE Publications.
- Nugraha, R. (2025). Representasi simbolik Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam membangun keamanan psikologis anak. *Jurnal Ilmu Komunikasi (UPN Veteran)*, 13(1), 88-102.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1991). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 8(1), 55-75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1991.9962913>

- Prasetyo, H. (2025). Perlindungan anak berhadapan dengan hukum: Analisis implementasi restorative justice. *Law Reform*, 21(2), 201-215.
- Putri, S. A. (2025). Strategi humas Polri dalam membangun citra polisi sahabat anak. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 41(1), 10-19.
- Santoso, B. (2025). Produksi pesan ramah anak dalam konten media sosial Divisi Humas Polri. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 9(2), 150-165.
- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103-122. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>
- Setyawan, D. (2025). Analisis wacana berita kriminalitas anak: Pelanggaran etika atau pemenuhan hak publik? *Scriptura*, 15(1), 34-48.
- Smith, J. (2024). Public perceptions of the police: The role of media narratives. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 39(2), 215-230. <https://doi.org/10.1007/s11896-024-xxxxx-x>
- Thompson, R. (2025). Communicating with child victims: Professional perspectives on sensitive interviews. *Journal of Child and Family Studies*, 34(4), 1102-1115.
- UNICEF Indonesia. (2024). *Manual komunikasi efektif untuk petugas penegak hukum dalam kasus anak*. UNICEF.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. In *The international encyclopedia of language and social interaction*. Wiley-Blackwell.
- Verma, A., & Kumar, S. (2025). Police-youth relations: Framing interactions in local news. *International Journal of Police Science & Management*, 27(3), 310-325.
- Waddington, P. A. J. (2025). Visualizing the police: Social media and the transformation of institutional image. *Crime, Media, Culture*, 21(1), 45-62.
- Walker, S. (2025). Building police trust through community engagement: A communication perspective. *Policing: An International Journal*, 48(2), 156-170.
- White, C., & Lewis, S. (2025). Public relations in law enforcement: Framing the 'human side' of police. *Journal of Communication Management*, 29(1), 82-98.
- Williams, K. (2025). Media representation of child protection policies in developing countries. *Police Practice and Research*, 26(2), 190-205.
- Zelizer, B. (2025). The media's role in framing institutional reform. *Communication Theory*, 35(3), 275-290.